

https://journal.gknpublisher.net/index.php/esawaya Vol. 1 No 1 Juli 2024 pp. 1- 13	Diterima Tanggal: 01 Juli 2024 Disetujui Tanggal: 07 Juli 2024
--	---

PERANAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA YANG BERINTEGRITAS

Ridel Gabriel Madelu
Mahasiswa S1 PAK IAKN Manado
ridelmadelu014@gmail.com

Abstrak

Pendidikan antikorupsi berperan penting dalam membentuk sikap, nilai, dan kesadaran moral yang kuat terhadap praktik korupsi. Dengan memperkuat nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini, pendidikan antikorupsi membantu menciptakan generasi muda yang mampu menolak, menghindari, dan melawan korupsi. Tujuan utamanya adalah mengubah paradigma masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan bersih dari praktik koruptif, serta memastikan pertumbuhan generasi penerus yang memiliki moralitas tinggi dan integritas yang tak tergoyahkan dalam menghadapi godaan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif pendekatan kepustakaan yang bersifat deskriptif. Data bersumber dari buku-buku kepustakaan atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan. Penekanan pada pendidikan anti korupsi ini diharapkan akan membawa perubahan budaya yang positif menuju masyarakat yang lebih transparan, adil, dan berintegritas

Kata kunci: Pendidikan, Antikorupsi dan Integritas

Abstract

Anti-corruption education plays an important role in forming strong attitudes, values and moral awareness towards corrupt practices. By strengthening the values of integrity, honesty and social responsibility from an early age, anti-corruption education helps create a young generation who is able to reject, avoid and fight corruption. The main goal is to change the paradigm of society to create an environment that is more transparent, fair and free from corrupt practices, as well as ensuring the growth of the next generation who have high morality and unshakable integrity in facing the temptation of corruption. The research method used in this article is qualitative research with a descriptive literature approach. Data comes from literature or research that has been carried out and published. It is hoped that this emphasis on anti-corruption education will bring positive cultural changes towards a society that is more transparent, fair and has integrity.

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah krusial yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia, hal ini bukan hanya sebuah masalah lokal, tetapi juga menjadi fenomena internasional yang memengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan merusak seluruh sendi kehidupan.¹ Korupsi telah merusak tatanan struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan sering kali disalahgunakan atau diperebutkan oleh pihak-pihak yang korup, ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses kehidupan masyarakat.

Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berpikir kehidupan masyarakat.² Hal ini tercermin atau dapat dilihat dalam praktik korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, kebiasaan memberi suap atau gratifikasi untuk memperoleh layanan, serta pola pikir yang membenarkan tindakan korupsi sebagai cara untuk mencapai keuntungan pribadi. Fenomena ini semakin berjalan dinamis dan berkembang sangat subur sehingga tindakan korupsi dipandang sebagai kejahatan yang dapat menggerogoti bangsa Indonesia.

Pendidikan yang adalah wadah dalam mengembangkan potensi manusia dengan membentuk kecerdasan sesuai amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 serta berusaha untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia agar dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan.³ Proses ini mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya anti korupsi melalui lembaga pendidikan yang sesuai dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan

¹ Dr. Eko Handoyo, M.si. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak), h. 2.

² Kristiono, N. (2018). "Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang". 2, 51–56.

³ Salistina, D. (2015). "Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden" *Jurnal Ta'allum*, 3(46), 163–184.

pendidikan nasional berfungsi dalam mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa.

Pendidikan secara umum didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.⁴ Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam memecahkan masalah terkait tindakan korupsi. Dilihat dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang dipertontonkan di berbagai media sosial di Indonesia, korupsi harus dicegah dan diberantas agar tidak berefek pada tatanan nilai bangsa Indonesia yang mengacu pada ideologi negara.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi anti sosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan hal yang membudaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Artikel ini akan mengeksplorasi peranan penting dari pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, agar dapat menciptakan perubahan budaya yang mampu memerangi tingkat korupsi di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau *library research* yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan proses mengumpulkan data serta menganalisis dan mengolah sumber-sumber dari buku, jurnal dan teks-teks penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan.

⁴ Yusrianto Kadir. (2018). "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi" *Gorontalo Law Review* 1(1), h. 25.

Hasil dan Pembahasan

Pada hakikatnya, korupsi merupakan isu yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral. Seseorang yang memiliki standar moralitas yang tinggi cenderung tidak terlibat dalam tindakan yang tidak bermoral, seperti korupsi. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan untuk memperkuat aspek moralitas individu guna membentuk generasi muda yang memiliki integritas dalam diri.⁵ Pendidikan moralitas mengambil peran yang signifikan dalam membentuk sikap, nilai, dan prinsip yang dapat mengarahkan individu untuk berperilaku secara etis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sebuah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Kemudian, Anti Korupsi adalah semua bentuk tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi.⁶ Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemberantasan praktik korupsi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta penerapan sistem dan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Pendidikan dan Budaya Antikorupsi merupakan upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada sektor swasta, masyarakat, dan aparat pemerintah agar berperilaku antikorupsi.⁷ Tujuannya adalah agar semua sektor tersebut mampu berperilaku secara konsisten dalam menolak dan melawan korupsi, membentuk budaya yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan dalam segala aktivitas, serta mendukung

⁵ Ridwan. (2012). "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum* 12(3). h. 552.

⁶ Op. Cit., h. 31.

⁷ Ibid.

tumbuhnya kesadaran yang kuat akan bahaya korupsi bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Secara umum, pendidikan antikorupsi dijelaskan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Suyanto, 2005: 43). Cara berpikir dan nilai-nilai baru penting disosialisasikan atau ditanamkan kepada peserta didik karena gejala korupsi di masyarakat sudah membudaya dan dikhawatirkan para generasi muda menganggap korupsi sebagai hal biasa.⁸ Pada dasarnya, pendidikan antikorupsi sebaiknya dapat ditanamkan sejak dini. Pemberian pendidikan antikorupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanaman akan nilai-nilai kebenaran dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang seperti korupsi juga akan dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya terlalu “toleran” terhadap korupsi menjadi semangat antikorupsi yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia.⁹

Pendidikan antikorupsi sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhir bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarah pada perilaku koruptif.¹⁰ Dalam pembelajaran pendidikan antikorupsi diarahkan pada pembentukan karakter sebagai fondasi dalam pembentukan nilai-nilai yang sudah terkandung dalam pendidikan antikorupsi itu sendiri, nilai-nilai tersebut sudah ditanamkan melalui pendidikan nilai moral. Dengan adanya pendidikan Antikorupsi, para pelajar Indonesia tentu dapat menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pelajar akan mampu menularkan semangat Antikorupsi kepada masyarakat di sekitarnya sehingga proses pemberantasan serta pencegahan kembali terjadinya korupsi.¹¹

Pendidikan anti korupsi merupakan program pendidikan mengenai korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi ialah memperkenalkan

⁸ Dr. Eko Handoyo, M.si. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak), h. 43.

⁹ Yusrianto Kadir. (2018). “Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi” *Gorontalo Law Review* 1(1), h. 25.

¹⁰ Op. Cit.

¹¹ Ibid.

fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Di samping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri pribadi peserta didik.¹²

Tujuan pendidikan antikorupsi ialah: sebagai pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; sebagai perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan; pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan 3 domain penting yaitu: *Pertama*, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensintesis ide-ide dan materi baru. *Kedua*, domain afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, yaitu domain psikomotorik menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar terbiasa berperilaku antikorupsi, maka dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi ketiga domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur.¹³

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sejalan dengan pelaksanaan atau penerapan pendidikan antikorupsi disekolah dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan antikorupsi.

Pengetahuan Tentang Korupsi

Dalam rangka memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi, terutama informasi yang

¹² Maria Montessori. "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah". h. 294.

¹³ Dr. Eko Handoyo, M.si. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak), h. 43-44.

memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa pada penerapan pendidikan antikorupsi. Di samping itu siswa juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi siswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Hal ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.¹⁴

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi di sekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan informasi itu diperlukan agar siswa mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam hal menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi siswa mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan pertimbangan tersebut selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.¹⁵

Pengembangan Sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.¹⁶ Semua elemen diatas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya.

¹⁴ Maria Montessori. "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah". h. 295.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Fishbean, Martin & Icek Ajzen. 1973. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction To Theory and Research*. Addison Wesley (Publishing : USA)

Perubahan pada satu elemen akan merubah pula elemen yang lainnya. Misalnya menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan merubah kognisi, sikap dan reaksi afektif. Oleh karena itu ketika memberikan informasi tentang korupsi, guru berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu siswa harus memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu. Di samping itu pula keterlibatan yang intens dalam aktivitas yang mengandung nilai-nilai antikorupsi juga akan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai tersebut.

Perubahan sikap

Pada realitasnya merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa di kalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.¹⁷

Pendidikan antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu diubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Maka dari itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi. Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang

¹⁷ Maria Montessori. "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah". h. 296.

mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena disinilah reaksi yang disebut *postponement effect*, dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.¹⁸

Pengembangan Karakter Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Karena itu pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan antikorupsi, diantaranya adalah:

Melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya

Siswa harus diberi tahu tentang hak, kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jika dalam diskusi siswa mengemukakan pilihannya terhadap sesuatu maka guru bisa memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan.

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut siswa bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Jika siswa mampu memutuskan sendiri berdasarkan pilihan yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu.¹⁹

Memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman luas

Dengan menciptakan situasi yang fleksibel dimana siswa bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru. Karena itu kegiatan dalam menganalisis kasus, diskusi, bermain peran atau wawancara siswa merupakan situasi yang akan mengembangkan karakter antikorupsi pada diri siswa.²⁰

Tidak begitu terfokus pada temuan fakta

Seperti halnya berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang Negara yang hilang dikorupsi per tahun atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi dsb. Hal itu juga penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu siswa menemukan sumber informasi, seperti

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih dsb. Siswa diminta untuk menganalisis posisi yang diambilnya, menyatakan pilihannya dan mengapa posisi lain tidak diambil. Dengan melatih siswa menggunakan tehnik berpikir kritis pertanyaan tersebut akan dapat dijawabnya.²¹

Melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas sosial disekolah dan di lingkungannya

Hal ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial dimana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.²²

Nilai-nilai Integritas Yang Harus Ditanamkan Kepada Generasi Muda

Nilai Kejujuran

Nilai kejujuran yang dimaksud sebagai pembentukan watak siswa dan mahasiswa untuk bersikap amanah terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak pernah berbohong. Nilai jujur seharusnya dimiliki siswa dan mahasiswa, tanpa memiliki sifat jujur siswa dan mahasiswa akan di kucilkan dan tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kejujuran dalam kehidupan sekolah dan kampus sangat diperlukan. karena kejujuran menjadi bukti otentik siswa dan mahasiswa untuk dapat dipercaya oleh teman sejawat, ketika siswa bahkan pun mahasiswa melakukan ketidakjujuran, maka akan dinilai sebagai mahasiswa yang terus-terusan berbohong. Oleh karena itu, kejujuran menjadi amanat untuk dapat dipercaya oleh orang lain.²³

Nilai Kepedulian

Kepedulian sangat penting bagi siswa dan mahasiswa di sekolah, kampus dan kehidupan sosial masyarakat. Siswa dan Mahasiswa sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Siswa dan Mahasiswa harus memiliki rasa peduli pada negeri ini. Sekolah dan Kampus sebagai rumah

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Agus Setiawan. (2023). "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi" *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1(1). h. 5.

kedua untuk dapat mempertajam wawasan agar dapat terarah dan membawa pada perilaku kebaikan terhadap masyarakat dan negara. Sebagai calon pemimpin masa depan, siswa dan mahasiswa perlu memiliki nilai kepedulian untuk memperhatikan lingkungan.²⁴

Nilai Kemandirian

Pendewasaan diri untuk dapat berpegang teguh pada amanatnya sebagai seorang siswa/mahasiswa adalah perilaku yang diperlukan. Kemandirian untuk tidak bergantung pada orang lain seperti, mengerjakan tugas akademik yang diberikan guru atau dosen, dan tanggung jawab sebagai kaum intelektual. Pembentukan kemandirian perlu dimiliki siswa dan mahasiswa sebagai landasan dalam memperkokoh tanggung jawab dan usahanya mengemban keinginannya sendiri tanpa bantuan orang lain.²⁵

Nilai Kedisiplinan

Kedisiplinan sebagai sikap yang harus dimiliki setiap siswa dan mahasiswa, agar dapat menumbuhkan ketaatan, tanggung jawab dan konsisten terhadap peraturan yang sudah diperlakukan oleh instansi sekolah bahkan perguruan tinggi. Pembentukan disiplin ini dianggap penting bagi siswa dan mahasiswa agar dapat mengelola waktu yang mengarah pada kemanfaatan serta berujung pada keefektifan dan keefisienan.²⁶

Nilai Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan karakter yang dimiliki seseorang atau kewajiban untuk menanggung dan memikul tanggung jawab. Jika siswa dan mahasiswa tidak memiliki rasa tanggung jawab maka akan lalai untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi ketika siswa dan mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab akan lebih cenderung untuk menyelesaikan tugas secara maksimal.²⁷

Nilai Kerja Keras

Pada dasarnya kerja keras dimiliki dengan timbulnya keinginan, Usaha untuk mendapatkan sesuatu diperlukan kerja keras dan kemauan yang matang dengan diikutserta ketekadan, ketekunan, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, dan kekuatan. Bagi mahasiswa bahkan siswa pembentukan karakter kerja keras begitu penting dalam mencapai hasil sesuai dengan keinginannya.²⁸

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

Nilai Sederhana

Kesederhanaan sebagai perilaku dan gaya hidup sebagai landasan siswa dan mahasiswa untuk hidup sederhana. Mahasiswa bahkan pun siswa diberikan asumsi untuk dapat meminimalisir tidak royal serta bertindak sesuai dengan kuadrat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sederhana tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sama dengan orang lain. oleh sebab itu, diperlukan siswa dan mahasiswa untuk menimbang kebutuhan yang diprioritaskan dan mengesampingkan keinginan yang dimiliki.²⁹

Nilai Keberanian

Keberanian harus ditanamkan pada jiwa siswa dan mahasiswa, untuk menjadi seseorang yang tanggung dalam menjalankan roda kehidupan. Sebagai siswa dan mahasiswa harus memiliki tekad dalam menanamkan komitmen, agar tujuan yang diinginkan tercapai. Keberanian diperlukan mahasiswa untuk menerima konsekuensinya ketika kegagalan dialami dan mendapatkan kebahagiaan jika usahanya menghasilkan kesuksesan.³⁰

Nilai Adil

Keadilan dijadikan tolak ukur untuk memutuskan suatu tindakan yang bijaksana, kata adil dijadikan putusan yang sama rata, tidak berat sebelah, dan tidak berpihak terhadap siapa pun. Bagi siswa dan mahasiswa karakter adil perlu ditanamkan oleh guru/dosen selama proses menimba ilmu agar siswa dan mahasiswa dapat belajar dan bertindak secara adil dan bijaksana tanpa ada yang dirugikan.³¹

Kesimpulan

Pendidikan antikorupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja. Pendidikan ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehingga mata pelajarannya didesain tidak hanya menekankan aspek kognitif, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik. Menekankan bagaimana agar anak didik melakukan sesuatu, atau menghindari sesuatu untuk mendapat penghargaan sosial dari orang lain. Bagi anak-anak, proses penalaran moral berkembang sejalan dengan proses belajar sendiri dan belajar dari lingkungan. Melalui pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif, terbuka kemungkinan internalisasi nilai-nilai. Peran Guru dan Dosen, orang tua, dan orang-orang di sekitar menjadi kunci. Mereka harus memberi

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

teladan berperilaku antikorupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini agar generasi berikutnya dapat menjadi generasi yang memiliki integritas.

Program Pendidikan Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki peran krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Melalui pendidikan ini, generasi muda dapat memahami bahaya dan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara. Pendidikan antikorupsi memberikan landasan nilai yang kuat, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi pondasi karakter yang tidak rentan terhadap perilaku koruptif. Dengan pendidikan antikorupsi yang efektif, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menolak dan melawan korupsi, serta membangun masyarakat yang lebih adil, bersih, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Agus Setiawan. (2023). "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi" *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1(1).
- Dr. Eko Handoyo, M.si. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Fishbein, Martin & Icek Ajzen. 1973. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction To Theory and Research*. Addison Wesley (Publishing : USA).
- Kristiono, N. (2018). "Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang". 2, 51–56.
- Maria Montessori. "Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah".
- Ridwan. (2012). "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum* 12(3).
- Salistina, D. (2015). "Pendidikan Anti Korupsi Melalui Hidden" *Jurnal Ta'allum*, 3(46), 163–184.
- Yusrianto Kadir. (2018). "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi" *Gorontalo Law Review* 1(1).